



**DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**RENCANA KERJA
TAHUN 2022**

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL
TAHUN 2022**

Disusun oleh :

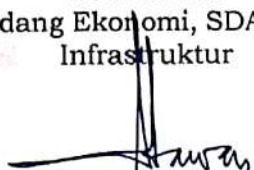
TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL TAHUN 2022


Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 07 September 2021


Koordinator
Bidang Ekonomi, SDA dan
Infrastruktur


WIRAWAN, ST, MT
NIP. 19690322 199703 1 004

Koordinator
Bidang Ekonomi, SDA dan
Infrastruktur


DWI FATMA A, SE, M.Ec.Dev
NIP. 19810619 200501 2 016

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**


Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya atas Rahmat dan hidayahNya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung tahun 2022 ini dapat tersusun.

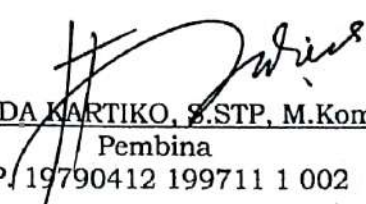
Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Temanggung telah menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 sebagai dokumen untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategik lima tahun Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023, juga untuk diajukan ke dalam RKPD Tahun 2022 yang nantinya sebagai dasar pengusulan ke APBD Kabupaten Temanggung tahun 2022.

Disadari bahwa substansi dokumen Renja DPM ini masih belum sempurna. Oleh karena itu saran dan masukan untuk perbaikan sangat diharapkan untuk dapat ditetapkan di Renja Tahun 2022.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kami berharap dokumen Renja tahun 2022 ini dapat ditetapkan menjadi Rencana Kerja tahun 2022 untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dari Dinas Penanaman Modal sehingga memberikan dampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Temanggung khususnya dalam menangani pelayanan perizinan dan investasi di daerah serta kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

Temanggung, September 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG


MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
Pembina
NIP. 19790412 199711 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPM TAHUN 2020.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPM Tahun 2020 dan Capaian Renstra DPM 2019-2020.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPM	39
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	39
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	46
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	46
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal.....	46
3.3 Program dan Kegiatan.....	48
BAB IV PENUTUP.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja s.d tahun 2020
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.
Tabel 2.3	Tabel Laju Investasi Tahun 2015-2020
Tabel 2.4	Realisasi Investasi Tahun 2015-2020
Tabel 2.5	Persentase Kajian Teknis Investasi Tahun 2015-2020
Tabel 2.6	Persentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang Terlatih Tahun 2015-2020
Tabel 2.7	Persentase Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Unggulan tahun 2015-2020
Tabel 2.8	Persentase Pelayanan Perizinan On line tahun 2015-2020
Tabel 2.9	Persentase Permohonan Izin Bebas Calo Tahun 2015-2020
Tabel 2.10	Persentase Perizinan Yang diterbitkan Tepat Waktu
Tabel 2.11	Persentase Kesesuaian perizinan Tahun 2015-2020
Tabel 2.12	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang terselesaikan Tahun 2015-2020
Tabel 2.13	Persentase Tertanganinya Gugatan Hukum di Dalam Pengadilan Tahun 2015-2020
Tabel 2.14	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Tabel 3.1	Tujuan ,Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan Keterkaitannya Dengan Pelaksanaan Visi, dan Misi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2022
Tabel 3.2	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2022
Tabel 3.3	Rencana Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung tahun 2022

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Hubungan dan Hicrarki Perencanaan Pembangunan
- Gambar 2.1 Notifikasi
- Gambar 2.2 Persetujuan Kepala
- Gambar 2.3 Realisasi Investasi Tahun 2020
- Gambar 2.4 Kajian Investasi Kawasan
- Gambar 2.5 Kajian Investasi Bawang Putih Tahun 2020
- Gambar 2.6 Kajian Investasi Pariwisata Bukit Kembang Arum Tahun 2020
- Gambar 2.7 Kajian Investasi Pertanian Kopi Berbasis Corporate Farming Tahun 2019
- Gambar 2.8 Kajian Investasi Pengembangan Kawasan Kledung Tahun 2019
- Gambar 2.9 Kajian Investasi Pariwisata Curug Surodipo tahun 2019
- Gambar 2.10 Kajian pengembangan UMKM Desa Bansari Pendekatan Bawah Atas Tahun 2019
- Gambar 2.11 Roadmap Investasi Rest Area Pringsurat Tahun 2018
- Gambar 2.12 Roadmap Investasi Pengembangan Wisata Wagir Bawang Tahun 2018
- Gambar 2.13 Leaflet
- Gambar 2.14 Data Jumlah Izin Online
- Gambar 2.15 Surat Kuasa dan Lembar Pendaftaran
- Gambar 2.16 Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Gambar 2.17 Berita Acara Verifikasi Lapangan
- Gambar 2.18 Berita Acara Penanganan Pengaduan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

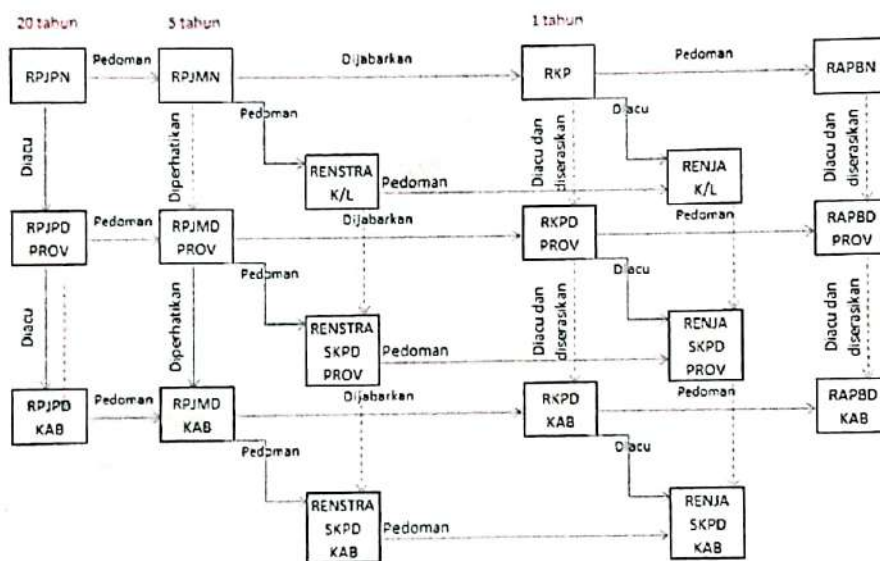
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Penanaman Modal, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Penanaman Modal, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinas Penanaman Modal;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinas Penanaman Modal;

- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Penanaman Modal;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Dinas Penanaman Modal; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Penanaman Modal.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Penanaman Modal untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Penanaman Modal.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;

- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasi kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Penanaman Modal;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal;

- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Penanaman Modal.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih

berifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Penanaman Modal. Namun dalam proses ini Dinas Penanaman Modal mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPM TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPM Tahun 2020 dan Capaian Renstra DPM Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2020 terhadap capaian renstra Dinas Penanaman Modal Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Penanaman Modal sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Penanaman Modal Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
s.d Tahun 2020

No	Bidang/ Program / Kegiatan	Indikator kerja /Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir		Realisasi		Target 2020			Realisasi		Capaian		Realisasi		Capaian		Ket.
				Renstra (2023)		s/d 2019					2020		2020		s/d 2020		s/d 2020		
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	Penanaman Modal								2,702,500,000	1,104,802,550		938,427,154				2,783,818,968		235	
1	Program pengkajian potensi investasi dan Pengembangan kinerja				1,219,074,700		193,522,700		250,000,000	90,609,500		90,208,500		99.6		283,731,200		23.27	
		Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	10		19		10			28.13	-	100		28		-	100	
		Persentase ketersediaan SDM bidang Penanaman Modal & Perizinan yg terlatih	%	100		100		100			0	-	0		-		-	-	
		Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100		60		100			60.0	-	60		60		-	60.00	
a	Pengkajian Potensi Investasi Pariwisata	Tersedianya kajian teknis potensi investasi pariwisata	Kajian	5	243,584,000	1	41,874,000	1	45,000,000	36,263,500	1	36,097,500	100	99.5	2	77,971,500	40.00	32.01	

3	Pengajian Pokok Investasi UMKM	Tersedianya kajian teknis potensi investasi UMKM	Kajian	5	245,423,000	1	44,941,300	1	45,000,000	0	0	0	0	1	44,941,300	20.00	18.31	
4	Pengajian Pokok Investasi Pertanian	Tersedianya kajian teknis potensi investasi pertanian	Kajian	5	242,077,500	1	41,052,500	1	45,000,000	23,590,000	1	23,590,000	100	100	2	64,642,500	40.00	26.70
5	Peningkatan Kualitas SDB guna peningkatan pelayanan perizinan	Tersedianya SDB perizinan yang terlatih guna peningkatan pelayanan perizinan	Orang	400	337,619,500	40	50,878,200	80	70,000,000	6,350,000	0	6,350,000	0	100	40	57,228,200	10.00	16.95
6	Sosialisasi Kebijakan PMA dan Peraturan Perizinan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan PMA dan Peraturan Perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha	Orang	800	150,370,700	77	14,776,700	77	45,000,000	24,406,000	77	24,171,000	100	99.0	154	38,947,700	19.25	25.90
7	Program Peningkatan SDM Investasi				2,191,988,200		336,459,036		455,000,000	23,727,500		21,590,750	91.0		358,049,786		16.33	
		Persentase Laju investasi	%	20		0		20		231.67		100		231.67		100		
		Nilai realisasi investasi	M	625		361.6		360		1245.66		100		1,246		100		
8	Penyelenggaraan Matchmaking & pameran Investasi	Terselenggaranya Matchmaking dan promosi & informasi investasi	Kegiatan	15	1,082,952,500	5	210,184,086	5	240,000,000	6,502,000	1	6,492,600	20	99.9	6	216,676,686	40	20.01

b	Penyelenggaraan Tamu Usaha	Terselenggaranya fasilitas kerjasama antara usaha besar dan UMKM	Kegiatan	19	200,695,000	4	20,170,000	4	45,000,000	0	0	-	0	0	4	20,170,000	21.05	10.05
c	Diseminasi Promosi Investasi	Terpublikasinya informasi investasi diluar pameran	Kegiatan	16	245,420,000	6	45,102,500	4	50,000,000	10,536,500	3	10,443,850	100	99.1	9	55,546,350	100	22.63
d	Pengembangan potensi unggulan Daerah	Terselenggaranya kegiatan forum investasi berbasis produk unggulan daerah	Kegiatan	16	207,236,500	4	27,087,750	1	45,000,000	2,515,000	0	2,509,250	100	99.8	4	29,597,000	25.00	14.28
e	Sosialisasi dan pelatihan LKPM	Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan LKPM	Pengusaha	800	197,414,200	50	15,712,100	50	25,000,000	1,654,000	0	1,610,000	0	97.3	50	17,322,100	6.25	8.77
f	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi dan Kebijakan PM	Terselenggaranya kegiatan forum investasi berbasis kewilayahan	Kegiatan	10	258,270,000	2	18,202,600	2	50,000,000	2,520,000	1	2,487,650	50	98.7	3	20,690,250	30.00	8.01
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan				2,006,058,000		294,699,335		510,000,000	191,487,000		167,813,668		87.6		462,513,003		23.06
		Persentase pelayanan perizinan on line	%	100		46.2		100		98.48		98.48		98		98.48		
		Persentase perizinan yang bebas calo	%	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95		81.21		95		96.20		100		96		100		
a	Fasilitasi percepatan Pelayanan Perizinan	Terlaksananya Percepatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Bulan	60	318,760,000	12	64,541,500	12	100,000,000	43,452,000	12	37,768,668	100	86.9	24	102,310,168	40.00	32.10

b	Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Terlaksananya Pelayanan Perizinan	Bulan	60	1,440,258,000	12	185,143,635	12	310,000,000	148,035,000	12	130,045,000	100	87.8	24	315,188,635	40.00	21.88
c	Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Perizinan	Terseleenggaranya pelayanan perizinan dengan baik	Kegiatan	1	247,040,000	1	45,014,200	1	100,000,000	0	0	-	0	0	1	45,014,200	100	18.22
d	Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan advokasi Perizinan				1,195,007,680		165,385,850		256,000,000	70,955,500		70,590,000		99.5		235,975,850		19.75
		Persentase kesesuaian pelaksanaan pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100		100		100		93.37		93.37		93			93.37	
		Persentase Pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100		100		100		100		100		100			100	
		Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100		100		100		100		100		100			100	
a	Monev dan Pembinaan kecamatan	Terlaksananya MONEV PATEN	Kegiatan	10	185,796,000	1	21,715,900	2	40,000,000	10,820,000	1	10,751,500	50	99.4	2	32,467,400	20.00	17.47
b	Pengawasan dan Pengendalian PM dan Perizinan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian PM dan Perizinan	Bulan	60	374,843,000	12	53,935,500	12	80,000,000	44,224,000	12	44,045,000	100	99.6	24	97,980,500	40.00	26.14
c	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya MONEV dan Pelaporan	Kegiatan	2	136,016,680	2	12,449,700	2	32,000,000	0	1	0	50	0	3	12,449,700	100	9.15
d	Fasilitasi Pengaduan	Terselesalkannya pengaduan dan gugatan di pengadilan	Bulan	60	253,996,000	12	29,980,150	12	56,000,000	15,911,500	9	15,793,500	75.00	99.3	21	45,773,650	35	18.02

e	Penyederhanaan Prosedure Perizinan dan Peningkatan Pelayanan	Terbitnya Raperda dan Raperbup	Kegiatan	S	244,356,000	1	47,304,600	1	48,000,000	-	0	-	0	0	1	47,304,600	20	19
B	Pendukung Urusan Perangkat Daerah				5,007,833,156				1,231,500,000	728,023,050		588,224,236		219		1,443,549,129		153
1	Program Perencanaan, Evaluasi dan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok dan pelaporan perangkat daerah		100	30,986,000	100	3,188,500	100	5,000,000	1,939,800	100	1,825,000	100	94.1	100	5,013,500	100	86
a	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen (25): Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Lakip, LPPD, PK, RFK, Evaluasi Renja	Dokumen	167	30,986,000	34	3,188,500	33	5,000,000	1,939,800	33	1,825,000	100	94.1	33	5,013,500	19.76	16.18
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	3,041,828,196	100	514,600,915	100	706,000,000	567,986,300	0	546,243,268	0	96.2		1,060,844,183	-	34.88
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik	bulan	60	527,999,996	12	75,467,825	12	100,000,000	79,560,000	12	72,509,895	100	91.1	24	147,977,720	40.00	28.03
b	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	bulan	60	300,000,000	12	40,352,099	12	53,000,000	47,528,000	12	45,917,547	100	96.6	24	86,269,646	40.00	28.76
c	Penyediaan ATK	Tersedianya ATK	bulan	60	220,000,000	12	47,341,000	12	61,000,000	26,749,400	12	26,472,500	100	99.0	24	73,813,500	40.00	33.55
d	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tercukupinya barang cetakan	bulan	60	349,688,000	12	84,123,650	12	85,000,000	59,195,000	12	59,017,900	100	99.7	24	143,141,550	40.00	40.93
e	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat penerangan listrik	bulan	60	13,500,000	12	7,497,340	12	15,000,000	6,772,900	12	6,506,000	100	96.1	24	14,003,340	40.00	103.73

f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Tersedianya bahan bacaan	bulan	60	17,100,000	12	2,878,000	12	4,000,000.00	2,130,000.00	12	2,130,000	100	100	24	5,008,000	40.00	29.29
g	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tercukupinya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	bulan	60	80,168,200	12	16,260,900	12	25,000,000.00	17,140,000.00	12	16,979,400	100	99.1	24	33,240,300	40.00	41.46
h	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah	bulan	60	256,720,000	12	95,920,300	12	75,000,000.00	52,506,000.00	12	52,210,480	100	99.4	24	148,130,780	40.00	57.70
i	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah	bulan	60	35,840,000	12	11,425,000	12	15,000,000.00	1,965,000.00	12	1,895,000	100	96.4	24	13,320,000	40.00	37.17
j	Jasa Pelayanan Perkantoran	Terbayarnya supporting Staf	bulan	60	736,812,000	12	133,334,801	12	147,000,000.00	147,000,000.00	12	146,394,814	100	99.6	24	279,729,615	40.00	37.96
k	Penyediaan Jasa Pengamanan gedung/kantor	Terbayarnya Jasa Pengamanan gedung/kantor	bulan	48	504,000,000			12	126,000,000.00	127,440,000.00	12	116,209,732	100	91.2	12	116,209,732	25.00	23.05
3	Program Peningkatan Sarana Prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	1,710,062,960	100	312,800,478	100	470,500,000	140,771,950	0	40,155,968	0	28.5		352,956,446	-	20.64
a	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Paket	13	213,200,000	1	49,322,500	1	85,500,000.00	0	0	-	0	0	1	49,322,500	7.69	23.13
b	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	Paket	5	191,234,560	3	40,210,620	1	75,000,000.00	61,600,000	1	38,273,408	100	62.1	4	78,484,028	80.00	41.04
c	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	bulan	60	590,000,000	6	99,976,000	12	100,000,000.00	12,535,200.00	12	12,490,500	100	99.6	18	112,466,500	30.00	19.06
d	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya sarana kendaraan dinas	bulan	60	445,000,000	12	59,267,358	12	105,000,000.00	53,386,750.00	12	48,090,218	100	90.1	24	107,357,576	40.00	24.13

e	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perengkapan kantor	bulan	60	71,210,800	9	13,242,000	12	25,000,000.00	5,000,000.00	12	4,995,000	100	99.9	21	18,237,000	35.00	25.61
f	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kerja	bulan	60	199,417,600	12	50,782,000	12	80,000,000	8,250,000	12	8,247,000	100	100	24	59,029,000	40.00	29.60
4	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100	224,956,000	100	24,735,000	100	50,000,000	17,325,000	0		100	0		24,735,000	-	11.00
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Kegiatan	5	224,956,000	1	24,735,000	1	50,000,000	17,325,000	1	17,325,000	100	100	2	42,060,000	40.00	18.70

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Penanaman Modal Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Pengkajian potensi investasi pariwisata
 - b. Pengkajian potensi investasi pertanian
 - c. Sosialisasi kebijakan PM dan peraturan perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha
 - d. Diseminasi promosi investasi
 - e. Pengembangan potensi unggulan daerah
 - f. Fasilitasi percepatan pelayanan perizinan
 - g. Peningkatan pelayanan perizinan satu pintu
 - h. Pengawasan dan pengendalian PM dan Perizinan
 - i. Fasilitasi pengaduan
 - j. Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan
 - k. Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik
 - l. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - m. Penyediaan ATK
 - n. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - o. Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor
 - p. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
 - q. Penyediaan makanan dan minuman
 - r. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - s. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
 - t. Jasa pelayanan perkantoran
 - u. Penyediaan jasa pengamanan gedung/kantor
 - v. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - w. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - x. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - y. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - z. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

- aa. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - bb. Penyusunan DED Mall Pelayanan Publik
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada
 3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan
 - b. Penyelenggaraan matchmaking dan pameran investasi
 - c. Sosialisasi dan pelatihan LKPM
 - d. Fasilitasi pengembangan kawasan investasi dan kebijakan PM
 - e. Monev dan pembinaan kecamatan

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu 84,58%. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan;
Capaian Kinerja : 97,15 % kategori Sangat Baik
2. Meningkatnya Laju Investasi
Capaian Kinerja : 72 % kategori Baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Penanaman Modal
Kabupaten Temanggung

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2020 (%)	Status	
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
A.	BIDANG PENANAMAN MODAL															
		INDIKATOR SASARAN														
		Pertumbuhan Investasi Daerah	%	20	20	20	20	20	0	231,67					100	TT
				Nilai Investasi tahun berjalan					375,6	1.245,7						
				Nilai Investasi tahun berjalan					760,5	375,6						
		INDIKATOR PROGRAM														
1	Program Pengkajian Potensi Investasi Pengembangan Kinerja	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	10	10	10	10	10	18,75	28,13					100	TT
				Jumlah Potensi Investasi yang sudah dikaji					6	9						
				Jumlah seluruh potensi investasi					32	32						
		Persentase ketersediaan SDM dan bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%	100	100	100	100	100	100	0					0	UK
				Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan					77	0						
				Jumlah SDM					77	40						
		Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100	100	100	100	100	60	60					60	AT
Jumlah informasi yang akan disediakan					3	3										
Jumlah peluang usaha sektor/bidang unggulan					5	5										
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Laju Investasi	%	20	20	20	20	20	0	231,67					100	TT
				Nilai Investasi tahun berjalan					375,6	1.245,7						
				Nilai Investasi tahun sebelumnya					760,5	375,6						
		Nilai Realisasi Investasi	Milyar	300	360	432	520	625	375,6	1.245,7				100	TT	
				Nilai Investasi tahun berjalan					375,6	1.245,7						

3	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	100	100	100	100	100	46,2	91,60					92	AT						
				Jumlah permohonan yang masuk melalui online														1272	6023				
				Jumlah permohonan izin yang masuk calo														2753	6575				
				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100	TT		
					Jumlah permohonan izin yang bebas calo														2753	6575			
				Jumlah permohonan perizinan														2753	6575				
				%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	81,21	92,64					97,51	AT		
					Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu														1232	6091			
				Jumlah pemohon izin yang telah diterbitkan														1517	6575				
				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93,37					93,37	AT		
					Jumlah izin yang sesuai dengan pelaksanaan														110	155			
				Jumlah lzin yang diterbitkan														110	166				
%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100	TT						
	Jumlah pengaduan masyarakat														12	12							
Tersesalkannya jumlah aduan														12	12								
%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100	TT						
	Jumlah tertanganinya gugatan hukum di dalam														0	0							
Jumlah gugatan hukum														0	0								
JUMLAH SEMUA INDIKATOR										12	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH					92,84							

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status **telah tercapai** ada 6 terdiri dari:
 - a. Persentase perizinan bebas calo
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah integritas petugas pelayanan yang baik.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah apabila pemohon tidak mau mengurus izin sendiri dengan alasan sibuk dan menyuruh orang lain.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah harus ada surat kuasa dari yang bersangkutan.
 - b. Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya kesepahaman pengadu dan yang diadukan terhadap masalah yang diadukan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah apabila yang diadukan dengan pengadu tidak mencapai kata sepakat/tidak ada jalan solusinya.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah aduan yang tidak tercapai kata sepakat diteruskan ke pengadilan
 - c. Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya putusan pengadilan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak.
 - 2) Faktor penghambat : tidak ada hambatan
 - d. Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah tersedianya potensi investasi yang dapat dikaji.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah pembuatan kajian kadang tumpang tindih dengan OPD lain.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah sinergitas antar OPD lebih ditingkatkan.
 - e. Persentase Laju Investasi
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah:
 - kemudahan pelayanan perizinan;
 - kepastian hukum keterkaitan zonasi industri dan tata ruang; dan

- stimulan bantuan presiden untuk UMKM.
- 2) Faktor penghambat untuk indikator tersebut adalah:
 - fluktuasi harga tanah akibat maraknya praktek percaloan tanah (makelar tanah) sehingga mengurangi minat berinvestasi di Temanggung; dan
 - Pemerintah daerah belum menyediakan kawasan industri.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya investasi.

f. Nilai Realisasi Investasi

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah:
 - kemudahan pelayanan perizinan;
 - kepastian hukum keterkaitan zonasi industri dan tata ruang; dan
 - stimulan bantuan presiden untuk UMKM.
- 2) Faktor penghambat untuk indikator tersebut adalah:
 - fluktuasi harga tanah akibat maraknya praktek percaloan tanah (makelar tanah) sehingga mengurangi minat berinvestasi di Temanggung; dan
 - Pemerintah daerah belum menyediakan kawasan industri.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah:
 - Mengikuti pameran investasi
 - Memfasilitasi temu usaha
 - Diseminasi potensi investasi
 - Perencanaan pendirian MPP

2. Capaian indikator dengan status **akan tercapai** ada 4 terdiri dari:

a. Persentase pelayanan perizinan online.

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kemampuan petugas pelayanan cukup memadai.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah anggaran untuk penyempurnaan aplikasi perizinan on line belum mencukupi.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah menganggarkan perbaikan/peningkatan aplikasi/perangkat lunak dan penambahan jumlah SDM yang kompeten.

- b. Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kecepatan, kecakapan petugas pelayanan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah belum semua kewenangan dan personil untuk melakukan verifikasi teknis di DPM.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi.
- c. Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kepatuhan pemohon terhadap izin yang dikeluarkan/diterbitkan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah potensi pelanggaran yang dilakukan pemohon.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah kegiatan ini akan ditindaklanjuti di tahun 2021.
- d. Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah masyarakat/investor membutuhkan informasi peluang usaha/bidang unggulan untuk dapat digunakan sebagai referensi dalam berinvestasi.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah keterbatasan data.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mengadakan survei lapangan untuk penyusunan informasi dan data.
3. Capaian indikator dengan status **upaya keras** ada 1 yaitu:
- a. Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah pentingnya peningkatan SDM
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya Pandemi Covid 19
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dengan adanya kebijakan *social & physical distancing* untuk sementara kegiatan ini ditiadakan.

2.2.2.Data Pokok

2.2.2.1 Laju Investasi Daerah

Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja.

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA).

Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsipun bertambah dan bertambah pula effective demand. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut induced investment. Dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari dua 2 macam, yaitu: PMA (Penanaman Modal Asing), jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri, sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) ialah jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri.

Rumus untuk memperoleh angka laju investasi adalah Nilai investasi tahun berjalan dikurangi nilai investasi tahun sebelumnya dibagi nilai investasi tahun sebelumnya kali 100

Laju investasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.3

Tabel Laju Investasi Tahun 2015-2020

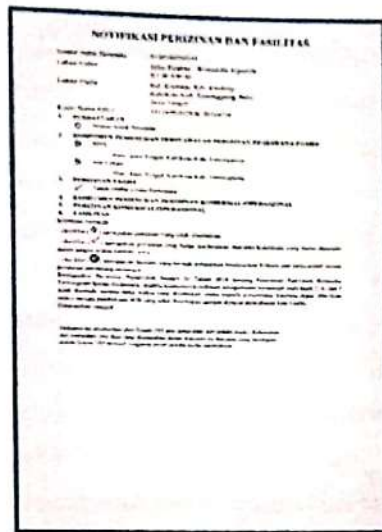
No	Urutan	tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai investasi tahun berjalan	99,55	117,67	164,65	760,49	375,6	1.245,66
2	Nilai investasi tahun sebelumnya	69,43	99,55	117,67	164,65	760,49	375,57
	Persentase	43,38	18,21	39,92	362	50,62	331,67

Berdasarkan Tabel 2.1 laju investasi di Kabupaten Temanggung selama Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 cukup fluktuatif.

Analisa data laju investasi selengkapnya sebagai berikut :

- Pada tahun 2015 laju investasi mengalami kenaikan sebesar 43,38%.
- Pada tahun 2016 laju investasi mengalami kenaikan sebesar 18,21%
- Pada tahun 2017 laju investasi mengalami kenaikan sebesar 39,92% hal ini disebabkan adanya semangat dan implementasi kebijakan kemudahan perizinan yang ditetapkan pemerintah pusat. Kemudahan perizinan tersebut secara nyata cukup berimbas di daerah, kemudahan pengurusan perizinan dan fasilitasi penanaman modal oleh pemerintah menjadikan sektor investasi terus mengalami pertumbuhan.
- Pada tahun 2018 laju investasi mengalami kenaikan sebesar 362 % hal yang mendasarinya diantaranya adalah semangat dari pemerintah pusat terkait kemudahan dan penyederhanaan pelayanan perizinan. Termasuk dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), menjadikan trust dan kesadaran publik pelaku usaha untuk melegalkan usaha dan semangat berinvestasi di masyarakat semakin tinggi. Kemudahan pelayanan perizinan melalui OSS berdampak pada tumbuhnya investasi secara signifikan.
- Pada Tahun 2019 laju investasi mengalami penurunan sebesar 50,62% ini dikarenakan tidak adanya industri besar baru yang masuk untuk menanamkan modalnya di Temanggung. Hal ini disebabkan antara lain karena fluktuasi harga tanah sebagai akibat maraknya praktek percaloan tanah (makelar tanah) sehingga mengurangi minat berinvestasi di Temanggung dan

- pemerintah daerah belum menyediakan kawasan industri.
 - Pada tahun 2020 nilai persentase laju investasi sebesar 231,67%
- Data dukung nya adalah proses perizinan usaha yang komitmennya sudah ternatifikasi



Gambar.2.1 Notifikasi



Gambar.2.2
Persetujuan Kepala

2.2.2.2 Nilai Realisasi Investasi

Realisasi investasi adalah nilai modal yang dipergunakan investor dalam menanamkan usahanya di berbagai bidang usaha terbuka yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Ruang Lingkup realisasi investasi meliputi realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Rumus nilai investasi pada tahun berjalan adalah penjumlahan dari realisasi investasi bidang usaha baru di tahun yang bersangkutan.

Tabel 2.4
Realisasi Investasi Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai investasi tahun berjalan	99,55	117,67	164,65	760,49	375,6	1.245,66
	Nilai investasi PMDN						1.245,66
	Nilai investasi PMA						0

- Memperhatikan sajian data tabel diatas, dari tahun ke tahun realisasi investasi mengalami kenaikan. Angka kenaikan cukup

- signifikan tersaji pada tahun 2018 yakni sebesar Rp. 760,49 Milyar yang didorong oleh realisasi investasi pembangunan pabrik sepatu baru di wilayah Kecamatan Kranggan. Sedangkan di periode 2019 ini tercatat nilai realisasi investasi menurun dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 375,6 Milyar
- Pada tahun 2020 nilai realisasi investasi sebesar Rp. 1.245,66 Milyar, kenaikan nilai realisasi investasi tersebut dikarenakan sejak bulan April 2020 terdapat aplikasi NSWI yang memuat data investasi UMK dan Non UMK secara keseluruhan, serta stimulant bantuan Presiden untuk UMKM membuat pengusaha bergerak aktif mengurus perizinan sehingga membuat laju investasi meningkat tajam sedangkan pada tahun 2019 belum ada aplikasi yang memuat data UMK, juga masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus perizinan.
 - Data Dukungnya adalah realisasi investasi berdasarkan pencatatan realisasi investasi bidang usaha baru tahun berjalan yang tercatat di sistem OSS Pusat berdasarkan notifikasi perizinan.

REALISASI INVESTASI KABUPATEN TEMbungga
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2020

No	Kategori / Sub Sektor	PERIODE JANUARI				PERIODE FEBRUARI				PERIODE MARCH				PERIODE APRIL				
		Jan	Februari	Maret	April	Jan	Februari	Maret	April	Jan	Februari	Maret	April	Jan	Februari	Maret	April	
1	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
2	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
3	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
4	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
5	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
6	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
7	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
8	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
9	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
10	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
13	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
14	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
15	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
16	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
17	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
18	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
19	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
20	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
21	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
22	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
23	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
24	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
25	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
26	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
27	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
28	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
29	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
30	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
31	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
32	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
33	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
34	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
35	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
36	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
37	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
38	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
39	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
40	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
41	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
42	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
43	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
44	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
45	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
46	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
47	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
48	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
49	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
50	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
51	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
52	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
53	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
54	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
55	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
56	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
57	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
58	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
59	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
60	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
61	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
62	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
63	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
64	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
65	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
66	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
67	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
68	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
69	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
70	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
71	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
72	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
73	Manufaktur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
74	Manufaktur & Perdagangan	11	11	11	11	1												

3.2.2.3 Persentase Tersedianya Kajian Teknis Potensi Investasi

Kajian Teknis adalah kajian untuk menganalisa kelayakan suatu rencana investasi yang meliputi perkiraan biaya investasi, kapasitas produksi dan teknologi.

Potensi Investasi adalah kemampuan investasi yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi aspek teknis, analisa kelayakan atau menghitung kelayakan

Rumus untuk mendapatkan Persentase Tersedianya Kajian Teknis Potensi Investasi adalah Jumlah potensi Investasi yang sudah dikaji dibagi Jumlah seluruh Potensi Investasi dikali 100

Tabel 2.5
Persentase Kajian Teknis Investasi Tahun 2015-2020

No	Uraian	tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah potensi Investasi yang sudah dikaji	na	na	na	1	6	9
2	Jumlah potensi Investasi	na	na	na	32	32	32
	Persentase	na	na	na	3,1	18,75	28,13

Dari data tersebut diatas untuk kegiatan pengkajian teknis investasi sampai dengan tahun 2020 telah terlaksana 8 kajian

Data dukung dari indikator ini adalah :

- Analisa Teknis Investasi
- Data-data yang sesuai dengan bidang yang akan dikaji
- Informasi dari masyarakat yang terkait dengan kajian investasi

Data dukung data kajian potensi investasi



Gambar 2.4 Kajian Investasi Kawasan



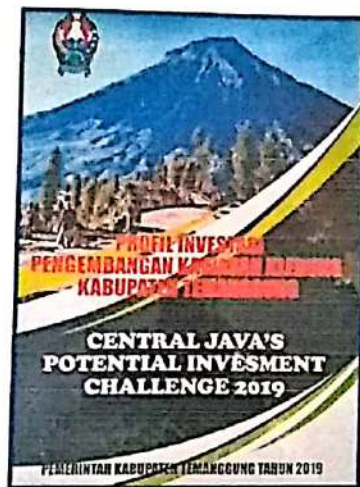
Gambar 2.5 Kajian Investasi Bawang Putih Tahun 2020



Gambar 2.6 Kajian Investasi Pariwisata Bukit Kembang Arum Tahun 2020



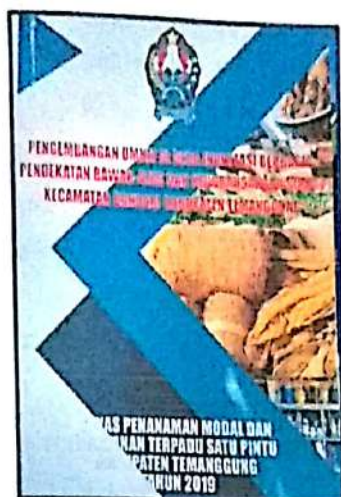
Gambar 2.7 Kajian Investasi
Pertanian Kopi Berbasis Corporate
Farming Tahun 2019



Gambar 2.8 Kajian Investasi
Pengembangan Kawasan Kledung
Tahun 2019



Gambar 2.9 Kajian Investasi
Pariwisata Curug Surodipo
Tahun 2019



Gambar 2.10 Kajian Pengembangan UMKM Desa Bansari Pendekatan Bawah Atas Tahun 2019



Gambar 2.11 Roadmap Investasi Rest Area Pringsurat Tahun 2018



Gambar 2.12 Roadmap Investasi Pengembangan Wisata Wagir Bawang Tahun 2018

2.2.2.4 Persentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih

Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih adalah ketersediaan SDM yang siap, mau dan mampu melaksanakan tugas dalam usaha pencapaian target investasi dan pelayanan perizinan.

Ruang lingkup dari kegiatan ini meliputi SDM PATEN dan SDM DPMPSTP.

Rumus dari indikator ini adalah Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dibagi Jumlah SDM dikali 100.

Tabel 2.6
Persentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah SDM yang terlatih	na	na	139	77	77	0
2	Jumlah SDM	na	na	139	77	77	40
	Persentase	na	na	100	100	100	0

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa SDM yang mengikuti pelatihan bidang PM dan Perizinan dari tahun 2017 – 2019 sudah 100%. Pada tahun 2020 kegiatan pelatihan bidang PM dan Perizinan belum bisa dilaksanakan dikarenakan adanya wabah “Virus Corona”, untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan *Social* dan *Phisycal Distancing*, sehingga kegiatan yang melibatkan orang banyak tidak diperbolehkan.

Data dukung dari indikator ini adalah:

- Data SDM yang mengikuti pelatihan adalah data SDM PATEN dan SDM DPMPSTP

2.2.2.5 Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan

Definisi : tersedianya informasi untuk masyarakat dunia usaha terkait dengan peluang investasi yang ada di Kabupaten Temanggung

Ruang Lingkup : Sektor Pariwisata, sektor UMKM, sektor Pertanian, Perkebunan, sektor peternakan dan sektor perikanan

Rumus Jumlah informasi yang akan disediakan dibagi jumlah peluang usaha sektor/bidang unggulan dikali 100%

Tabel 2.7
Persentase tersedianya informasi peluang usaha
sektor/bidang unggulan Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah informasi yang disediakan	na	na	na	1	3	3
2	Jumlah peluang usaha sektor unggulan	na	na	na	6	5	5
	Persentase	na	na	na	16,67	60	60

Untuk indikator persentase tersedianya informasi peluang usaha/ sektor bidang unggulan di tahun 2020 masih 60 % tersedia yaitu bidang Pariwisata, UMKM dan Pertanian.

Data dukung : sc web, foto informasi/leaflet



Gambar 2.13 Leaflet

2.2.2.6 Persentase Pelayanan Perizinan On line

Pelayanan Perizinan On line adalah pelayanan yang didasarkan/berbasis pada teknologi, informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.

Ruang lingkup indikator ini meliputi data perizinan dan non perizinan dan Perizinan yang sifatnya komersial

Rumus indikator ini adalah jumlah permohonan yang masuk melalui online dibagi dengan semua permohonan izin yang masuk kali 100.

Tabel 2.8
Persentase Pelayanan Perizinan On Line
Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Permohonan on line	na	na	na	361	1272	6023
2	Jumlah pemohon	na	na	na	361	2753	6575
	Persentase	na	na	na	100	46,2	91,60

Dari data diatas persentase pelayanan perizinan online pada tahun 2020 sebesar 91,60%. Kecenderungan perizinan online dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 meningkat karena selain perizinan berusaha yang melalui OSS juga ada perizinan selain izin berusaha yaitu melalui aplikasi *sicantik cloud* yang terus diusahakan penyempurnaan aplikasinya dengan tahapan pembuatan format izin yang belum pernah diterbitkan bisa dilayani secara online.

Data dukung untuk indikator ini adalah data pemohon secara on line dan data keseluruhan permohonan izin

Data dukung Screenshoot perizinan online

DATA JUMLAH IZIN (JENIS, WAKTU, DAN) DALAM ON LINE (1 JANUARI 2020) TERPILIH KAMPASER (1) MANAGALING

No	Jenis Izin	Jumlah Izin						Waktu Izin		
		Jumlah Izin	Jumlah Izin	Jumlah Izin	Jumlah Izin	Jumlah Izin	Jumlah Izin	Jumlah Izin	Jumlah Izin	Jumlah Izin
1	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50	IZIN PERUSAHAAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Gambar 2.14 Data Jumlah Izin Online

2.2.2.7 Persentase perizinan bebas calo :

Perizinan bebas calo adalah pengurusan perizinan yang dilakukan secara mandiri, transparan antara pemohon dan petugas.

Ruang lingkup indikator untuk tercapainya perizinan yang bebas calo adalah SDM perizinan dan juga masyarakat

Rumus indikator persentase perizinan bebas calo adalah Jumlah permohonan perizinan yang bebas calo dibagi permohonan perizinan kali 100

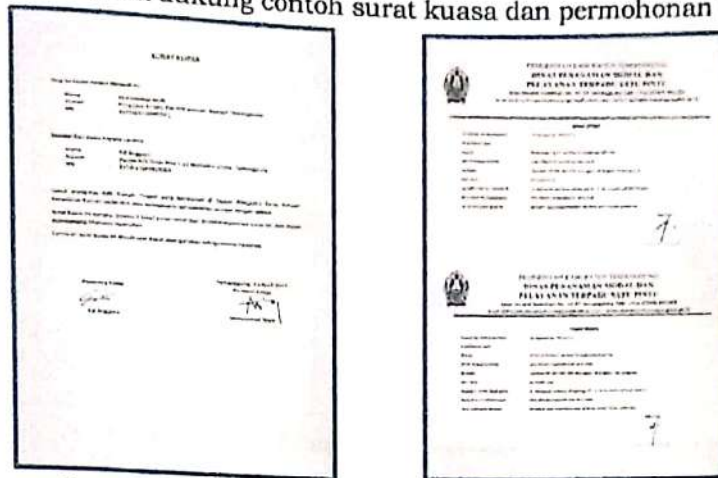
Tabel 2.9
Persentase Permohonan Izin Bebas Calo
Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah permohonan Izin bebas calo	na	na	na	1912	2753	6575
2	Jumlah permohonan izin	na	na	na	1912	2753	6575
3	Persentase	na	na	na	100	100	100

Data dukung untuk indikator ini adalah semua izin yang masuk dengan surat pernyataan atau surat kuasa yang diberikan

pemohon jika pemilik dari usaha tidak bisa langsung untuk mengajukan permohonan izin.

Data dukung contoh surat kuasa dan permohonan langsung



Gambar 2.15 Surat Kuasa dan Lembar Pendaftaran

2.2.2.8 Persentase Perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu

Definisi dari penyelesaian perizinan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan prosedur dan syarat-syaratnya.

Ruang lingkup indikator ini adalah semua pemohon ijin sifatnya komersial dan non komersial.

Rumusnya adalah jumlah perizinan yang diterbitkan tepat waktu dibagi jumlah permohonan izin yang diterbitkan dikali 100

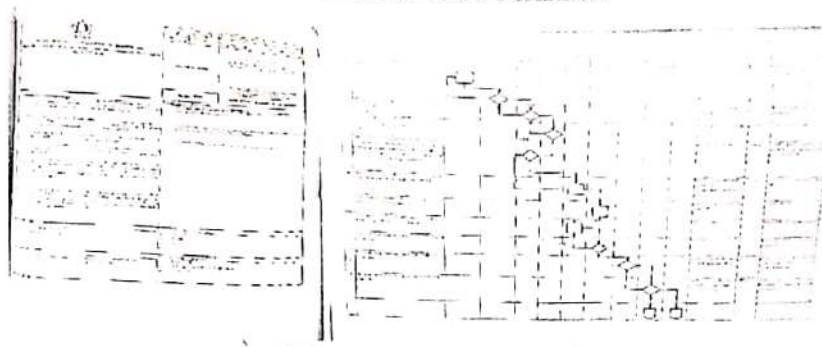
Tabel 2.10
Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu
Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Izin tepat waktu	na	na	910	1042	1232	6091
2	Jumlah permohonan izin yang diterbitkan	na	na	1665	1912	1517	6575
3	Persentase	na	na	56,64	54,5	49,28	92,64

Dari data tersebut dapat dianalisa yaitu dari tahun 2017-2020 perizinan yang tepat waktu masih belum mencapai 95% ini dikarenakan adanya beberapa kendala teknis di Tim seperti peraturan perundangan teknis Perangkat Daerah lain dan kurangnya Sumber daya Manusia untuk melakukan verifikasi teknis.

Pada tahun 2020 perizinan yang tepat waktu sebesar 92,64%.

Data dukung indikator ini adalah SOP Perizinan



Gambar 2.16 Standar Operasional Prosedur (SOP)

2.2.2.9 Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan

Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.

Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ruang lingkup indikator ini adalah izin yang diterbitkan

Rumus Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan adalah Jumlah izin yang sesuai dengan pelaksanaan dibagi dengan izin yang diterbitkan kali 100.

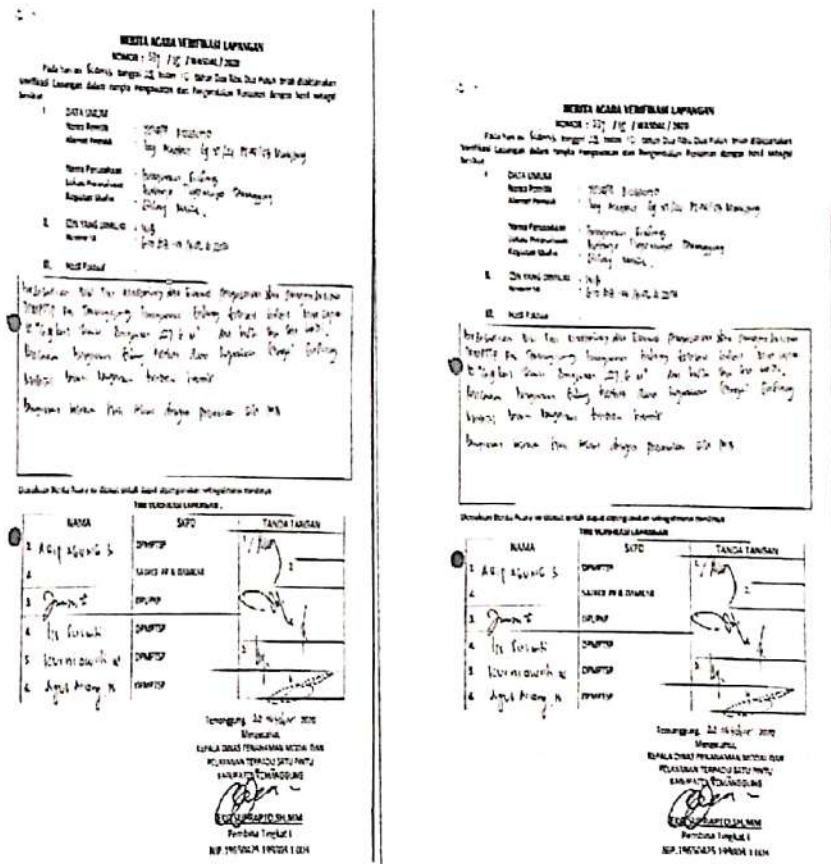
Tabel 2.11
Persentase Kesesuaian Perizinan Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kesesuaian Perizinan	na	na	na	173	110	155
2	Jumlah izin yang diterbitkan	na	na	na	174	110	166
	Persentase	na	na	na	99,43	100	93,37

Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan pantauan terhadap kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan sejumlah 110 kegiatan Perizinan, atas hasil pengawasan dan pengendalian tersebut bahwa seluruh Perizinan di Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kepatuhan dengan prosentase 100% terhadap kesesuaian pelaksanaan perizinan di lapangan dengan izin yang telah diterbitkan.

Pada tahun 2020 pelaksanaan perizinan baru mencapai 93,37%, hal ini disebabkan karena ada IMB yang ditetapkan di akhir bulan Desember, sementara kegiatan diakhir tahun sudah tidak ada. Selanjutnya dalam rangka pengawasan dan pengendalian untuk izin yang telah diterbitkan akan diverifikasi lapangan di tahun berikutnya.

Data dukung berupa Berita Acara Pengawasan dan Pengendalian Perizinan, yang selanjutnya disingkat BA, adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kesesuaian Penerbitan izin.



Gambar 2.17 Berita Acara Verifikasi Lapangan

2.2.2.10 Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana pengaduan untuk penanganan pengaduan pelayanan publik dan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberi tugas kepada petugas penanganan yang kompeten untuk melaksanakan fungsi pengelolaan pengaduan.

Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Pengaduan dapat dilakukan oleh setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya ketidaksesuaian standar proses perizinan atau ketidaksesuaian komitmen Pelaku usaha terhadap izin yang sudah dikeluarkan oleh DPMPTSP. Pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara lain melalui surat aduan, kotak aduan, melalui website DPMPTSP, dan sms gateway. DPMPTSP telah membentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 melalui Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 034 Tahun 2018.

Ruang lingkup data ini adalah pengelolaan aduan

Rumus indikator ini adalah Jumlah Pengaduan masyarakat yang terselesaikan dibagi dengan jumlah aduan kali 100

Tabel 2.12
Persentase Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan
Tahun 2015-2020

No	Uraian	tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pengaduan terselesaikan	na	na	na	34	12	12
2	Jumlah Pengaduan	na	na	na	34	12	12
	Persentase	na	na	na	100	100	100

Sesuai dengan data tabel diatas, pada tahun 2017 tidak terdapat satupun pengaduan masyarakat. Dalam analisa DPMPTSP Kabupaten Temanggung, keadaan tersebut terjadi karena minimnya sarana pengaduan pada lembaga pelayanan publik yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung pada saat

itu, sehingga masyarakat tidak tahu kemana mereka harus melakukan pengaduan terhadap kegiatan penanaman modal yang ada.

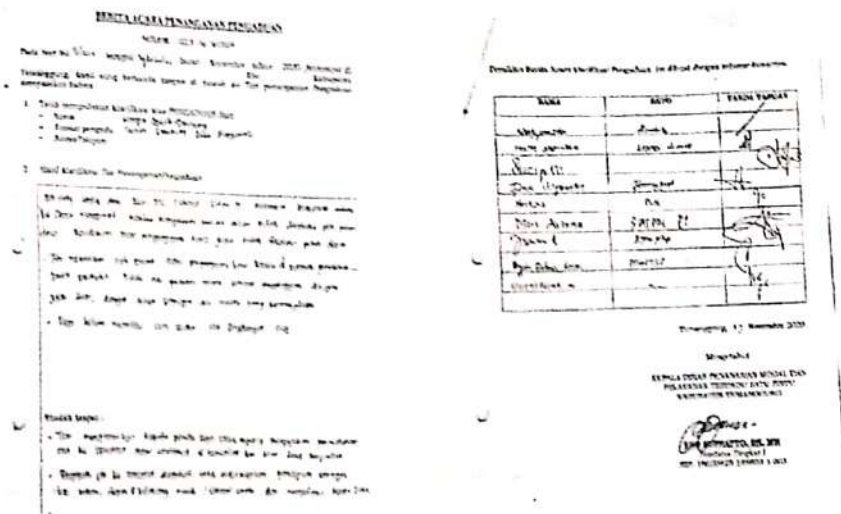
Pada Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung melakukan pembenahan dan melengkapi sarana dan prasarana pengaduan dengan membuat Ruang Pengaduan, menetapkan petugas penanganan pengaduan, membuat SOP Pengaduan, menerapkan system pengaduan secara langsung maupun tidak langsung, secara online dan secara offline, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perbaikan system pengaduan.

Sehingga pada tahun 2018 terdapat data pengaduan yang masuk ke DPMPPTSP Kabupaten Temanggung sejumlah 34 pengaduan masyarakat. Menurut Pengaduan masyarakat yang masuk pada Tahun 2018, prosentase terbesar adalah terkait dengan pelanggaran pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang sudah mendapatkan izin atau belum mendapatkan izin dari DPMPPTSP Kabupaten Temanggung, bukan dari kualitas pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh petugas pelayanan publik pada DPMPPTSP kabupaten temanggung. Sejumlah 34 Pengaduan yang masuk ke DPMPPTSP semuanya sudah diselesaikan dalam kurun waktu tahun yang sama. DPMPPTSP membentuk Tim Penanganan pengaduan melalui Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari Gabungan OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung, sehingga penyelesaian Pengaduan masyarakat dapat segera terselesaikan oleh tim penanganan pengaduan. Melihat jumlah pengaduan pada tahun yang masuk pada Tahun 2018 sangat signifikan bila dibandingkan dengan 2017, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi keberhasilan perubahan dan penambahan sarana prasarana, dan sistem pada lembaga pelayanan publik di Kabupaten Temanggung, sehingga masyarakat bisa dengan mudah dan berani melakukan pengaduan masyarakat.

Pada Tahun 2019 Pengaduan di Kabupaten Temanggung yang masuk sejumlah 12 pengaduan dan pengaduan tersebut sudah diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan yang tertuang dalam berita acara penanganan pengaduan. Pada tahun 2019 Tim Penanganan Pengaduan juga sudah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung sehingga

Pengelolaan pengaduan di Kabupaten Temanggung sudah mempunyai standar dan prosedur yang jelas dalam menangani pengaduan. Prosedur dan standar pengelolaan pengaduan.

Pada tahun 2020 jumlah aduan yang masuk 12 pengaduan dan aduan tersebut dapat diselesaikan



Gambar 2.18 Berita Acara Penanganan Pengaduan

Data Dukung yang disajikan berupa Berita Acara penanganan pengaduan pada setiap pengaduan masyarakat yang terselesaikan dan data Rekapitulasi aduan

2.2.2.11 Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan

Definisi Gugatan hukum adalah permasalahan baik pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.

Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Biasanya, bagi orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan atas keputusan tersebut, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun berdasarkan atas pelaksanaan salah satu kegiatan penanaman modal di Kabupaten Temanggung

Scanned with CamScanner

Ruang Lingkup gugatan terhadap perizinan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP.

Rumus Jumlah tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan di bagi jumlah gugatan dikali 100%.

Tabel 2.13
Persentase Tertanganinya Gugatan Hukum Di Dalam Pengadilan Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	na	na	1	1	0	0
2	Jumlah gugatan hukum	na	na	1	1	0	0
	Persentase	na	na	100	100	100	100

Berdasarkan data diatas dapat dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terdapat 1 gugatan hukum dan dapat diselesaikan di dalam pengadilan. Pada tahun 2019 sampai dengan triwulan III tahun 2020 belum ada gugatan hukum yang masuk ke DPMPTSP

Data Dukung : 1. Relas Panggilan Dari Pengadilan Negeri Temanggung kepada Tergugat

2. Surat Kuasa Khusus guna mewakili persidangan.

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung.

Data dukung tsb diperlukan apabila ada gugatan hukum.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPM

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja DPM dari 11 indikator terdapat 4 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan

Hal ini disebabkan karena keterbatasann anggaran untuk kegiatan pengumpulan data kajian potensi investasi

- Indikator persentase pelayanan perizinan online

Hal ini disebabkan karena anggaran untuk penyempurnaan aplikasi perizinan online belum mencukupi juga keterbatasan SDM yang kompeten

- Indikator persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu

Hal ini disebabkan belum semua kewenangan dan personil untuk melakukan verifikasi teknis ada di DPM

- Indikator persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan

Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian perizinan

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPM, antara lain :

- Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan belum mencukupi

- Belum semua kewenangan dan personil untuk melakukan verifikasi teknis ada di DPM

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar

- Peningkatan dan pemenuhan kebutuhan anggaran
- Pelimpahan regulasi kewenangan dan disertai penyerahan personil pendukung atau SDM nya

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD tidak terdapat penambahan program, kegiatan dan pagu anggaran.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table 2.14 berikut:

Tabel 2.14

Review terhadap Rancangan awal RKPd Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Ketepatan Dana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
1	FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN							1	BELANJA TIDAK LANGSUNG						
A.	Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							A.	Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi		Tersusunnya dokumen perencanaan: Renja, Perubahan Renja, PK, RKA, DPA, RKPA, DPPA			3.000.000	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi		Tersusunnya dokumen perencanaan: Renja, Perubahan Renja, PK, RKA, DPA, RKPA, DPPA			3.000.000		
			Tersusunnya Dokumen Evaluasi: LPPD, LKJIP, Ev. Renja, IKPD, Data Pokok Pembangunan, RFX							Tersusunnya Dokumen Evaluasi: LPPD, LKJIP, Ev. Renja, IKPD, Data Pokok Pembangunan, RFX					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	3.395.257.000		Administrasi Keuangan		Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	3.395.257.000		
			Terbayarnya Insentif Pungutan Retribusi	12	bulan					Terbayarnya Insentif Pungutan Retribusi	12	Bulan			
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	1	Kegiatan	50.000.000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	1	Kegiatan	50.000.000		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya alat penerangan listrik	12	bulan	5.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya alat penerangan listrik	12	Bulan	5.000.000		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	40.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya alat tulis kantor	12	Bulan	40.000.000		

RANCANGAN AWAL RKPD 2022

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Batuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Batuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terukupinya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	55.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terukupinya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	55.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Terukupinya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	12	bulan	25.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Terukupinya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	12	bulan	25.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah	12	bulan	50.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah	12	bulan	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah	12	bulan	3.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah	12	bulan	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA, Listrik dan Internet	12	bulan	100.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA, Listrik dan Internet	12	bulan	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terbayarnya jasa servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	20.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terbayarnya jasa servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	20.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya honor SS	12	bulan	418.230.800		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya honor SS	12	bulan	418.230.800	
			Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	bulan					Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	bulan		
			Tersedianya jasa Pengamanan Gedung Kantor	12	bulan					Tersedianya jasa Pengamanan Gedung Kantor	12	bulan		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terbayarnya jasa servis kendaraan dan pembayaran pajak kendaraan	12	bulan	60.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terbayarnya jasa servis kendaraan dan pembayaran pajak kendaraan	12	bulan	60.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya gedung kantor	12	bulan	100.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	12	bulan	18.000.000
			Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor	12	bulan	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Terselenggaranya Kegiatan Forum Investasi Berbasis Kewilayahan	4	kegiatan	100.000.000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					110.000.000
			Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dan Dunia Usaha Dan Peraturan Perizinan	1	kegiatan	
			Terpublikasinya informasi investasi di luar pameran	7	kegiatan	

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
			Terpeliharanya gedung kantor	12	bulan	100.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	12	bulan	18.000.000	
			Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor	12	bulan		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Terselenggaranya Kegiatan Forum Investasi Berbasis Kewilayahan	4	kegiatan	100.000.000	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan	1	kegiatan	110.000.000	
			Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dan Dunia Usaha Dan Peraturan Perizinan	1	kegiatan		
			Terpublikasinya informasi investasi di luar pameran	7	kegiatan		

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Terseleenggaranya matchmaking dan promosi & informasi investasi	2	kegiatan					Terseleenggaranya matchmaking dan promosi & informasi investasi	2	kegiatan		
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Terlaksananya percepatan pelayanan perizinan	12	bulan	382.589.200		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Terlaksananya percepatan pelayanan perizinan	12	bulan	382.589.200	
			Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan perizinan	12	bulan					Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan perizinan	12	bulan		
			Terlaksananya pemenuhan sarana prasarana perizinan	1	kegiatan					Terlaksananya pemenuhan sarana prasarana perizinan	1	kegiatan		
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Terselesaikannya pengaduan dan gugatan di pengadilan			20.000.000		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Terselesaikannya pengaduan dan gugatan di pengadilan			20.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Terlaksananya Pemantauan Penanaman modal	12	bulan			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Terlaksananya Pemantauan Penanaman modal	12	bulan	125.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Terselenggaranya temu usaha dalam rangka menjangkau Penanam Modal luar daerah di kabupaten	2	kegiatan	50.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Terlaksananya Monev dan pelaporan LKPM	2	kegiatan	150.000.000
			Terlaksananya pengawasan dan pengendalian PM dan perizinan	12	bulan	
			Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan LKPM	50	orang	

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Terselenggaranya temu usaha dalam rangka menjangkau Penanam Modal luar daerah di kabupaten	2	kegiatan	399.999.700	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Terlaksananya Monev dan pelaporan LKPM	2	kegiatan	175.000.300	
			Terlaksananya pengawasan dan pengendalian PM dan perizinan	12	bulan		
			Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan LKPM	50	orang		

Sumber : DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPd Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPd Kab. Temanggung.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja DPM Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Penanaman Modal Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
 dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI DINAS PENANAMAN MODAL KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan	Meningkatnya investasi sektor riil	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	100
				Persentase perizinan yang bebas calo	%	100	100
				Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95	95
			2. Program Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan advokasi Perizinan	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100	100
				Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100
				Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100
				Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	10	10
	Meningkatnya Laju Investasi		1. Program pengkajian potensi investasi dan pengembangan kinerja	Persentase ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih	%	100	100
				Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100	100
				Persentase Laju Investasi	%	20	20
			2. Program Peningkatan Iklim Investasi	Nilai Realisasi Investasi	%	520	625

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Tahun 2019-2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	418.230.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	18.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100.000.000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	382.589.200
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	50.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	150.000.000
JUMLAH	5.155.077.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	418.230.800	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	18.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100.000.000	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	382.589.200	
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	125.000.000	+125.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	50.000.000	+50.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	175.000.000	+175.000.000
JUMLAH	5.325.077.000	+ 450.000.000

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2022

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif pada Tahun 2022 sebesar Rp. 450.000.000,- , dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdapat pengurangan / penghapusan sub kegiatan dalam rancangan awal Dinas Penanaman Modal sejumlah 1 (satu) kegiatan yaitu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan Pengurangan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
2. Terdapat penambahan sub kegiatan di luar rancangan awal Dinas Penanaman Modal, sejumlah 1 (satu) kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan penambahan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,-
2. Terdapat penambahan pagu anggaran pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp. 349.999.700,- Koordinasi dan Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Sebesar Rp. 25.000.000,-.

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Kab. Temanggung
Tahun 2022

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maja Rencana 2023	Sumber Dana	
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
X	XX	1	2.01				3.000.000		1.939.800	1.825.000		7.000.000	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi	Tersusunnya dokumen perencanaan: Renja, Perubahan Renja, PK, RKA, DPA, RKPA, DPPA	Temanggung	3.000.000		1.939.800	1.825.000		7.000.000	DAU
					Tersusunnya dokumen evaluasi: LPPD, LKJIP, Ev. Renja, IKPD, Data Pokok Pembangunan, RFK								
X	XX	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.395.257.000	3.395.257.001	-	-	-	3.351.465.000	DAU
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhiya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Temanggung	14	bulan	3.395.257.000	3.395.257.001		3.351.465.000	
					Terpenuhiya Insentif Pungutan Retribusi		12	bulan					
X	XX	1	2.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah			175.000.000	150.999.450	243.418.300	218.914.688		309.672.000	

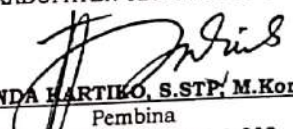
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat penerangan listrik	Temanggung	12	bulan	5.000.000	5.099.450	6.772.900	6.506.000	5.000.000	DAU		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan		12	bulan			2.130.000	2.130.000	3.500.000	DAU		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Temanggung	12	bulan	40.000.000	30.000.000	26.749.400	26.472.500	40.000.000	DAU		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	Temanggung	12	bulan	55.000.000	55.000.000	59.195.000	59.017.900	66.172.000	DAU		
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Tercukupinya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Temanggung	12	bulan	25.000.000	20.000.000	17.140.000	16.979.400	15.000.000	DAU		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah	Luar Temanggung	12	bulan	50.000.000	40.000.000	52.506.000	52.210.480	40.000.000	DAU		
					Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah	Temanggung								50.000.000	DAU	
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Temanggung	12	Bulan					40.000.000	DAU		
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Temanggung	2	Kegiatan			61.600.000	38.273.408	50.000.000	DAU		
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	Temanggung / luar	1	Kegiatan			17.325.000	17.325.000	50.000.000	DAU		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							541.230.800	538.429.600	403.493.000	382.926.988	425.328.000	
X	XX	1	2.04										5.000.000	DAU		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah	Temanggung	12	Bulan	3.000.000	3.000.000	1.965.000	1.895.000	58.000.000	DAU		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA Listrik dan Internet	Temanggung	12	Bulan	100.000.000	98.000.000	79.560.000	72.509.895		DAU		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terbayarnya jasa service Peralatan dan Perlengkapan	Temanggung	12	Bulan	20.000.000	20.000.000		47.528.000	45.917.547	47.000.000	DAU	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Temanggung	12	Bulan	418.230.800	417.429.600	127.440.000	116.209.732	125.000.000	DAU		
					Tersedianya jasa Pengamanan Gedung Kantor	Temanggung	12	Bulan								

					Terbayarnya supporting staff	Temanggung	12	Bulan			147.000.000	146.394.814		149.325.000	DAU	
X	XX	1	2.05		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				178.000.000	77.269.600	79.171.950	73.822.718		260.000.000		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya jasa servis kendaraan dan pembayaran pajak kendaraan	Temanggung	12	Bulan	60.000.000	45.000.000	53.386.750	48.090.218		90.000.000	DAU
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyusunan DED Gedung Mall Pelayanan Publik	Temanggung				18.769.600					DAU
						Terpeliharanya gedung Kantor	Temanggung	12	Bulan	100.000.000		12.535.200	12.490.500		130.000.000	DAU
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	Temanggung	12	Bulan	18.000.000	13.500.000	8.250.000	8.247.000		30.000.000	DAU
						Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor	Temanggung	12	Bulan			5.000.000	4.995.000		10.000.000	DAU
					PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL											
X	XX	1	2.06		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota				100.000.000	99.999.799	64.888.500	64.634.400		253.000.000		
					Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terselenggaranya kegiatan forum investasi berbasis kewilayahan	Temanggung	4	Kegiatan	100.000.000	79.999.799	2.520.000	2.487.650		80.000.000	DAU
					Pengkajian Potensi Investasi Pariwisata	Tersedianya kajian potensi investasi pariwisata	Temanggung	1	Kajian		20.000.000	36.263.500	36.097.500		50.000.000	DAU
					Pengkajian Potensi Investasi UMKM	Tersedianya kajian potensi investasi UMKM	Temanggung								50.000.000	DAU
					Pengkajian Potensi Investasi Pertanian	Tersedianya kajian potensi investasi pertanian	Temanggung	1	Kajian			23.590.000	23.590.000		50.000.000	DAU

				Pengembangan Potensi unggulan daerah	Terselenggaranya forum investasi berbasis produk unggulan daerah	Temanggung				2.515.000	2.509.250		45.000.000	DAU
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL										
X	XX	1	2.07	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota					110.000.000	149.999.609	47.794.500	47.457.450	360.000.000	
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersedianya SDM Perizinan terlatih guna peningkatan pelayanan perizinan	Temanggung /Luar	1	Kegiatan			6.350.000	6.350.000	70.000.000	
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha dan peraturan perizinan	Temanggung	1	Kegiatan	110.000.000	146.619.625	24.406.000	24.171.000	30.000.000	DAU
					Terpublikasinya informasi investasi diluar pameran	Temanggung	11	Kegiatan			10.536.500	10.443.550	50.000.000	DAU
					Terselenggaranya matchmaking dan promosi & informasi investasi	Temanggung /Luar	2	Kegiatan		3.379.954	6.502.000	6.492.500	210.000.000	DAU
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL										
X	XX	1	2.08	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					402.589.200	344.620.500	207.398.500	183.607.168	502.000.000	
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya percepatan pelayanan perizinan	Temanggung	12	Bulan	382.589.200	324.620.500	148.035.000	130.045.000	50.000.000	
					Terlaksananya percepatan pelayanan	Temanggung	12	Bulan					100.000.000	DAU

					Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan LKPM	Temanggung	50	Orang			1.654.000	1.610.000	40.000.000	DAU
					Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan	Terbitnya Raperda dan Raperbup	Temanggung				-	-	48.000.000	DAU
					JUMLAH					5.605.077.000	5.256.575.526	1.104.802.550	1.029.644.912	5.753.465.000

Temanggung, September 2021
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 KABUPATEN TEMANGGUNG


MANDA HARTIKO, S.STP, M.Kom
 Pembina
 NIP. 19790412 199711 1 002

BAB IV PENUTUP

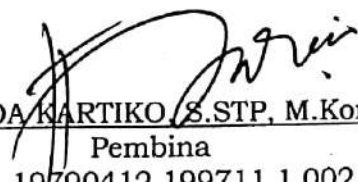
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung tahun 2022 merupakan agenda tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023 yang merupakan Rencana Strategis dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja pemerintah 2022. Rencana kerja ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan, sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran tahun 2022 pada seluruh bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 96,85 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 93,49 % sehingga dapat dikatakan kinerja cukup efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Dinas Penanaman Modal mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 5.605.077.000,- yang terdiri dari 5 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Demikian Rencana Kerja tahun 2022, semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2022 ini, harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, September 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG


MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
Pembina
NIP. 19790412 199711 1 002